

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP merupakan dokumen identitas resmi yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. e-KTP tidak hanya berfungsi sebagai bukti identitas diri, tetapi juga menjadi dasar bagi masyarakat dalam mengurus berbagai pelayanan administrasi publik lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran, pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, perbankan, hingga pemilu. Program e-KTP dirancang untuk mewujudkan tertib administrasi, mencegah duplikasi data, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Oleh karena itu, kehadiran e-KTP berperan penting dalam menjamin hak sipil dan kemudahan akses pelayanan publik bagi seluruh warga negara.

Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan berbasis e-KTP (Kartu Tanda penduduk) di Indonesia merupakan salah satu langkah reformasi sistem identitas nasional yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Ditjen Dukcapil. Program ini bertujuan menciptakan sistem identitas Tunggal (single identity number) berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang terintegritasi secara nasional. Identitas kependudukan yang akurat akan menjadi sebuah fondasi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perencanaan Pembangunan, hingga pelaksanaan demokrasi.

Dalam implementasinya, kebijakan e-KTP dilaksanakan hingga tingkat daerah, termasuk di Kecamatan Ujungberung yang merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung. Sebagai wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang cukup dinamis dan mobilitas masyarakat yang tinggi, kebutuhan akan administrasi kependudukan yang tertib dan akurat menjadi sangat penting. Pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP di tingkat kecamatan berperan sebagai ujung tombak dalam memastikan setiap warga terdata secara resmi dalam sistem nasional.

Pemerintah pusat menetapkan standar pelayanan, sedangkan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan implementasi kebijakan tersebut hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Kecamatan Ujungberung sebagai bagian dari wilayah administratif memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pelayanan e-KTP kepada masyarakat secara langsung.

.Pelayanan perekaman dan penerbitan e-KTP merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas administrasi kependudukan. Sebagai bagian dari wilayah administratif Kota Bandung, Kecamatan Ujungberung memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan perekaman dan penerbitan e-KTP kepada masyarakat. Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik berperan langsung dalam mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Implementasi tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, hingga evaluasi pelayanan.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan program pelayanan e-KTP sering kali menghadapi berbagai tantangan terkait ketersediaan fasilitas, SDM, teknologi, serta pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan e-KTP. Banyak kasus menunjukkan bahwa masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman atau belum memperbarui e-KTP, khususnya menyangkut perubahan data, karena kurangnya informasi, waktu, atau motivasi. Selain itu, permasalahan antrean, waktu tunggu, dan proses administrasi juga dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Hal ini berdampak pada akses mereka terhadap layanan administrasi lainnya yang mensyaratkan e-KTP sebagai dokumen utama.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara kebijakan pelayanan e-KTP yang sudah ditetapkan dengan realitas di lapangan, khususnya dalam hal efektivitas implementasi dan kesadaran masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat dapat menyebabkan berkurangnya partisipasi dalam proses perekaman e-KTP, sehingga program kebijakan tidak berjalan optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, disposisi atau sikap pelaksana yang mendukung, serta struktur birokrasi yang berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan program pelayanan e-KTP di Kecamatan Ujungberung guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan Administrasi kependudukan terutama dalam proses pembuatan e-KTP yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. berdasarkan alasan-alasan tersebut, judul penelitian ini dipandang relevan, aktual, serta memiliki nilai teoritis dan praktis dalam mendukung perbaikan Implementasi kebijakan program pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-KTP (elektronik Kartu Tanda Penduduk) di tingkat kecamatan Ujungberung, Kota Bandung.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah elemen inti dalam sebuah studi yang membantu membatasi ruang lingkup kajian. Fokus ini memungkinkan peneliti untuk mempersempit topik yang luas menjadi masalah spesifik yang dapat dianalisis secara mendalam. Dengan memilih fokus yang tepat, penelitian dapat menjadi lebih terarah dan efisien merupakan batas masalah yang ada di dalam penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dimana Metode

penelitian kualitatif menurut (Sugiyono) adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu masalah, menggunakan analisis deskriptif untuk mengungkap makna daripada angka, serta peneliti sebagai alat utama pengumpul data. berisikan tentang pokok masalah serta memberikan gambaran jelas terhadap masalah yang diteliti.

Berdasarkan rumusan penelitian tersebut, maka terdapat tujuan penelitian ini yaitu memfokuskan kepada Implementasi kebijakan program pelayanan administrasi kependudukan berbasis E-KTP di kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Indikator keberhasilan implementasi kebijakan sangat penting untuk mengevaluasi seberapa efektif suatu kebijakan dilaksanakan dan dampaknya terhadap masyarakat. e-KTP merupakan program yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) sejak tahun 2006, tetapi baru ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2009 lalu dengan berdasarkan pada undang-undang dan peraturan presiden. Program e-KTP ini pada dasarnya telah dilaksanakan secara nasional pada seluruh kab/kota oleh pemerintah pusat. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan Proses Administrasi Kependudukan yang tertib dan efisien. Dengan adanya e-KTP, maka setiap penduduk berkewarganegaraan hanya memerlukan satu kesatuan Identitas resmi yang diakui dan diwajibkan oleh Negara sebagai bentuk legalisasi Kependudukan, agar terhindar dari potensi penyalahgunaan KTP manual.

Program e-KTP merupakan langkah signifikan dalam modernisasi administrasi kependudukan di Indonesia. Meskipun ada tantangan dalam

pelaksanaannya, upaya terus menerus dalam sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan fasilitas akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program ini. Keberhasilan implementasi E-KTP tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan sumber daya manusia yang memadai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu :

Bagaimana proses Implementasi kebijakan program pelayanan Adminstarasi kependudukan di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

Untuk mengetahui gambaran Implementasi kebijakan Administrasi kependudukan dalam program pelayanan pembuatan (elektronik kartu tanda penduduk) e-KTP di Kecamatan Ujungerung Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan, baik secara teoritis, akademil, praktis dan subjektif.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada sasaran Masyarakat mengenai Implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam pembuatan e-KTP pada Dinas Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung. Selain itu diharapkan dapat memperkaya pengetahuan umum bagi civitas akademis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, prodi Administrasi Publik, Universitas Pasundan,. Serta menambah wawasan nbagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga masukan kepada pemerintah kecamatan Ujungberung guna mengembangkan hal-hal yang beketerkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dalam implementasi kebijakan program pelayanan e-KTP di kecamatan Ujungberung.

3. Secara Akademik

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu administrasi publik.

4. Secara Subjektif

Penelitian ini dapat melatih dan menambah inefisiensi berpikir ilmiah dan kemampuan penelitian dan bentuk Usulan penelitian Skripsi di Bidang Administrasi Publik.